

MENINJAU KEMBALI RUANG PUBLIK: TINJAUAN LITERATUR TENTANG MEDIA SOSIAL DAN PEMBENTUKAN AGENDA POLITIK MELALUI LENSA HABERMAS

Received : 28-04-2025 Revised : 06-05-2025 Accepted : 19-05-2025

Aini Faezah Ramlan¹, Mustabsyirotul Ummah Mustofa², Zaidatul Insyirah Suhaini³, Nur Qistina Sarah Azizi⁴, Wan Anas Hadirah Mohd Norizam⁵, Ratnia Solihah⁶

¹Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cabang Melaka
faezah877@uitm.edu.my

ABSTRAK

Di era digital saat ini, platform media sosial telah menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi publik dan agenda politik. Berita palsu, diperparah dengan adanya manipulasi media sosial, memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis bagaimana dampak berita palsu terhadap persepsi publik yang berdampak pada polarisasi dan posisi media sosial sebagai ruang publik dalam menentukan agenda politik. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kultivasi dan uses and gratification untuk menyelidiki kekuatan media sosial dalam membentuk agenda politik. Selain itu, penggunaan teori ruang publik Habermas digunakan untuk mengelaborasi dampak ruang publik di media sosial. Penelitian dilakukan dengan metode studi literature dengan analisis tematik berkaitan dengan kata kunci sosial media, ruang publik, komunikasi politik, dan agenda politik. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana individu secara aktif mengonsumsi berita palsu untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan penggunaan media sosial secara strategis oleh paraaktor politik untuk menyebarkan propaganda dan memajukan politik. Paparan informasi yang salah secara terus menerus di media sosial menumbuhkan persepsi yang terdistorsi tentang realitas politik di antara para pengguna, sementara mempertanyakan konstruksi ruang publik deliberative di media sosial manakala agenda politik di media sudah ditetapkan oleh para aktor politik. Penelitian ini memberikan sumbangsih pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks terkait media sosial, dalam membentuk wacana dan opini publik di era digital disaat bersamaa, ruang publik yang dikonstruksi oleh aktor politik berpengaruh.

Kata Kunci: Agenda Politik, Polarisasi Politik, Ruang Publik, Sosial Media

ABSTRACT

In the contemporary digital era, social media platforms have assumed a pivotal role in shaping public perception and influencing political agendas. The dissemination of disinformation, exacerbated by the manipulation of social media platforms, possesses the capacity to influence public sentiment and potentially impact the outcomes of electoral processes. The present study aims to analyse the impact of fake news on public perceptions that lead to polarisation and the position of social media as a public space in determining the political agenda. The present study employs cultivation communication theory and uses and gratification to investigate the influence of social media in shaping the political agenda. Furthermore, Habermas' concept of the public sphere is employed to elucidate the influence of this sphere on social media. The research was conducted using a literature study method with thematic analysis related to the keywords social media, public sphere, political communication, and political agenda. The results indicate that individuals actively consume fake news to fulfil psychological needs. Furthermore, the strategic use of social media by political actors to spread propaganda and further their political agenda is evident. The pervasive dissemination of misinformation through social media engenders a distorted perception of political reality among users, thereby challenging the establishment of a deliberative public sphere within this digital domain. This is further compounded by the pre-established political agenda within media platforms, which is largely dictated by political actors. This research contributes to a more profound comprehension of the intricate dynamics associated with social media, in shaping public discourse and opinion in the digital age. Concurrently, the public sphere is constructed by influential political actors.

Keywords: Political Agenda, Political Polarization, Public Space, Sosial Media

²Universitas Padjadjaran, Indonesia, mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

³Universiti Teknologi MARA (UiTM), cabang Melaka, insyirahsuhaini03@gmail.com

⁴Universiti Teknologi MARA (UiTM), cabang Melaka, qistinasaraha@gmail.com

⁵Universiti Teknologi MARA (UiTM), cabang Melaka, anashadirah1203@gmail.com

⁶Universitas Padjadjaran, Indonesia, ratnia@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana media sosial sebagai ruang publik dikuasai dan dikolonisasi oleh aktor politik untuk membentuk agenda politik mereka sendiri alih-alih menjadi ruang publik yang terbuka bagi Masyarakat.

Di era digital saat ini, platform digital telah merevolusi pola komunikasi, konsumsi informasi, serta interaksi individu dengan lingkungannya. Pengaruhnya terasa kuat dalam berbagai sektor, termasuk politik. Kehadiran ruang digital ini memainkan peran penting dalam mengarahkan opini publik, membentuk narasi, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi (Smith, 2022; Johnson, 2023; Anderson, 2024). Kanal ini kini menjadi sarana strategis bagi partai politik untuk menyampaikan pesan, memperluas jangkauan audiens, dan memperkuat citra mereka. Berbagai format konten seperti teks, visual, hingga audiovisual dengan mudah didistribusikan melalui platform tersebut, memungkinkan partai untuk mempromosikan agenda politik secara langsung tanpa bergantung pada media konvensional. Selain itu, pendekatan yang lebih personal dan interaktif yang ditawarkan oleh jejaring daring ini berhasil membangun kepercayaan serta memperkuat relasi antara kandidat dan pemilih, melebihi efektivitas media cetak maupun penyiaran tradisional.

Di Amerika Serikat, internet memfasilitasi penggalangan dana yang cukup besar melalui situs web pribadi seperti my.BarackObama.com, serta Facebook dan Twitter (Chinnasamy, 2013; Smith, 2022; Johnson, 2023). Menurut Pew (2008), satu dari sepuluh pengguna internet menyumbang untuk seorang kandidat. Howard Dean, mantan Gubernur Vermont, menekankan peran internet dalam mempromosikan dan merevitalisasi demokrasi, yang disoroti oleh penggalangan dana online yang signifikan selama kampanye 2004 (Williams and Tedesco, 2006). Dengan demikian, internet telah membuktikan sangat berguna untuk perolehan suara dalam pemilu dan menjadi alat penting untuk komunikasi politik. Selain itu, aplikasi media sosial menjadi platform bagi individu atau kelompok untuk memperkuat suara mereka dan mendukung tujuan yang mereka gerakan seperti #BlackLivesMatter dan #MeToo telah mendapatkan daya Tarik yang signifikan., “ini adalah bentuk kontribusi orang kulit hitam kepada komunitas ini, kemanusiaan dan ketahanan kita dalam menghadapi penindasan yang mematikan” Garza Alicia (contributor Sejarah Gerakan #BlackLivesMatter).

Media sosial telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk menyebarkan kesadaran dan memfasilitasi komunikasi tentang berbagai topik. Mulai dari masalah sosial dan lingkungan hingga kampanye Kesehatan dan gerakan budaya. Platform media sosial menawarkan wadah bagi individu dan organisasi untuk memperkuat pesan mereka dan menjangkau audiens secara global (Manyu Li, 2021). Dengan miliaran pengguna di seluruh dunia, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Tiktok memberikan peluang yang tak tertandingi untuk penyebaran informasi dan keterlibatan Masyarakat. Media sosial juga memengaruhi budaya dan tren saat ini karena media sosial juga memengaruhi budaya populer, membentuk tren mode, music, seni dan lainnya. Konten viral menyebar dengan cepat memengaruhi perilaku dan pilihan.

Media sosial memainkan peran penting dalam wacana politik, kampanye pemilihan umum dan aktivisme. Media sosial memungkinkan para politisi untuk terlibat langsung dengan konstituen dan memobilisasi dukungan. Selain itu, dampak dan kesadaran sosial juga merupakan peran penting dalam media sosial karena akan meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial, krisis dan tujuan kemanusiaan. Hal ini juga memfasilitasi upaya penggalangan dana dan mendorong dukungan untuk organisasi amal. Privasi data dan isinformasi juga menjadi kekhawatiran yang melekat pada privasi data, karena platform media sosial mengumpulkan data dalam jumlah besar. Selain itu, penyebaran informasi yang salah dan berita palsu merupakan tantangan yang terus diatasi oleh platform ini.

Penyebaran informasi melalui media tradisional dan media baru secara signifikan memengaruhi agenda politik. Di era globalisasi saat ini, di mana Masyarakat semakin mengutamakan informasi, dampak media sosial dalam membentuk wacana politik tidak bisa diabaikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi menjadi lebih mudah diakses, mengalir dengan mudah melalui platform seperti media sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya internet, media sosial semakin banyak digunakan untuk tujuan politik. Penggunaannya yang meluas di Masyarakat kontemporer terutama di kalangan perkotaan telah memberikan dampak yang besar terhadap lanskap politik (Ali, 2016). Ketersediaan media sosial untuk publik menyediakan platform bagi semua pesaing politik untuk mempromosikan agenda mereka menggunakan berbagai teknik untuk memengaruhi opini publik.

Para politisi, kelompok kepentingan, dan aktivis semuanya mengakui kekuatan media sosial dalam memperkuat pesan mereka dan memajukan agenda mereka. Melalui penggunaan tagar, kampanye viral dan pesan yang ditargetkan secara strategis, para aktor ini dapat secara efektif menyoroti isu-isu, memprioritaskan topik-topik tertentu, dan memengaruhi opini publik. Selain itu, internet dan media sosial telah menciptakan "system media hibrida" baru yang memperluas jangkauan aktor yang mampu memengaruhi wacana dan agenda politik (Chadwick, 2017; Jungherr et al, 2019). Teori penyusunan agenda, yang menjelaskan bagaimana media berita dapat memengaruhi pentingnya topik-topik dalam agenda publik, menunjukkan bahwa saluran komunikasi massa menekankan topik-topik tertentu di atas topik lainnya, sehingga membentuk opini publik. Media sosial telah menjadi alat yang penting bagi para politisi untuk membentuk citra publik mereka dan menunjukkan keahlian di bidang-bidang yang mereka minati. Pesan-pesan media sosial seringkali mencerminkan penekanan politisi terhadap isu-isu tertentu selama siklus legislative dan kampanye pemilu (Gilardi, Fabrizio. Gessler, Theresa; Kubli, Mael: Muller, Stefan, 2022).

Lanskap politik berubah secara dramatis di era digital karena pengaruh media sosial yang meluas. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah berevolusi dari alat komunikasi menjadi mesin yang kuat yang membentuk agenda politik di seluruh dunia. Transformasi ini mengaburkan batas antara wacana publik, aktivisme, dan pemerintah yang memicu kekaguman sekaligus kekhawatiran. Artikel ini meneliti bagaimana media sosial telah mengubah lanskap politik, mulai dari mobilisasi gerakan akar rumput hingga

memengaruhi hasil pemilu dan membahas tantangan dan implikasi dari era baru demokrasi digital ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menarik pemilih muda karena aksesibilitas, interaktivitas, dan komunikasi antar pemilih. Influencer media sosial, yang menjadi terkenal melalui platform seperti Instagram, Youtube, dan Tiktok, membina komunitas khusus berdasarkan minat tertentu dan membina hubungan yang akrab dengan para pengikutnya. Situs-situs seperti Facebook dan Youtube memiliki jumlah akun terdaftar tertinggi dengan 1,86 miliar akun Facebook, diikuti oleh Whatsapp dan Youtube dengan masing-masing 1,2 miliar dan 1 miliar pengguna (Statista, Percent of US Population, 2018). Secara keseluruhan, meskipun menawarkan manfaat besar seperti peluang komunikasi dan pemasaran, masih ada tantangan seperti masalah privasi dan informasi yang salah. Dengan menggunakan media sosial secara bertanggungjawab, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk perubahan dan hubungan yang positif.

Penelitian terdahulu lebih sering menyoroti media sosial sebagai sarana pemberdayaan politik dan partisipasi digital. Namun, terdapat celah dalam kajian kritis terhadap bagaimana media sosial justru mengalami kolonisasi oleh aktor politik yang mengatur arus informasi, membentuk agenda, dan menutup ruang deliberatif yang seharusnya menjadi milik publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan studi literatur. Penelitian menggunakan sumber sekunder yang berfokus pada artikel jurnal dan penelitian yang terkait yang telah diterbitkan yang relevan dengan topik polarisasi politik, pengaruh media sosial terhadap opini publik, serta peran media sosial dalam pembentukan agenda politik.

Peneliti memilih literatur secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi topik yang secara eksplisit membahas keterkaitan antara media sosial dan dinamika politik kontemporer. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan database yakni Google Scholar, ScienceDirect dan Scispace. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi: "social media and political polarization", "agenda setting and digital platforms", "media influence on public opinion", "digital public sphere", dan "political communication in the digital era".

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan mengidentifikasi tema-tema utama, konsep kunci, serta temuan utama literatur yang dikaji. Proses studi literatur dilakukan dengan mensintesis data dari sumber tersebut. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap literatur ilmiah saat ini mengenai pengaruh media sosial terhadap opini publik dan agenda politik.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Teori Tindakan Komunikatif

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian mengacu pada teori kritis Habermas yang mengkritisi “industry kultur”, yakni struktur yang dirasionalkan dan birokratisasikan (misalnya, jaringan televisi) yang mengendalikan kultur modern (Ritzer and Goodman, 2003). Bagi Habermas, kesadaran massa menjadi dikontrol oleh kekuatan eksternal yang berdampak pada kegagalan massa mengembangkan kesadaran revolusioner. Dalam konteks penggunaan media sosial saat ini, teori kritis Habermas sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana media sosial memiliki peran ganda sebagai sebuah Tindakan instrumental, dimana mengendalikan opini dan agenda politik lewat platform media sosial; dan juga Tindakan komunikatif, dimana dialkettika di media sosial mengarah pada pemahaman Bersama melalui dialog yang terbuka, egaliter dan inklusif.

Tindakan instrumental Habermas melibatkan satu aktor Tunggal dalam hal ini bisa pemerintah, aktor politik atau influencer politik, yang secara rasional memperhitungkan cara untuk dapat mencapai tujuan. Tindakan strategis melibatkan dua atau lebih individu yang mengoordinasikan Tindakan rasional-purposif dalam mencapai tujuan yakni penguasaan instrumental. Tindakan berikutnya yakni Tindakan komunikatif dimana Tindakan agen-agen yang terlibat dikoordinasikan bukan melalui pertimbangan egosenstris untuk mencapai tujuan, melainkan melalui Tindakan untuk mencapai pemahaman. Bagi Habermas, partisipan tidak memiliki tujuan pada keberhasilan mereka sendiri melainkan mengharmoniskan Tindakan berdasarkan definisi situasi Bersama (Ritzer and Goodman, 2003).

Kolonisasi Ruang Publik Digital

Media sosial digunakan sedemikian rupa oleh para aktor politik untuk bisa memperoleh suara dalam pemilu dan menguasai diskursus untuk kepentingan agenda politik mereka. Suna (2024), mengatakan bahwa media sosial yang digunakan secara serius oleh para elit politik semasa kampanye memiliki implikasi yang luar biasa seperti misinformasi, echo chambers dan bias algoritma. Hal ini menjadi tantangan dalam proses demokratisasi dan yang juga berdampak pada pembentukan opini publik.

Salah satu dampak dari misinformasi dalam pemilu adalah manipulasi online. Studi Hajdúková (2024) menyebutkan bahwa manipulasi opini publik melalui platform online berdampak pada masa depan kredibilitas Lembaga publik dan membuat proses pemilu lebih rentan terhadap campur tangan aktor politik. Cara-cara manipulasi opini publik dapat terjadi melalui disinformasi, defamasi (menargetkan kandidat tertentu dengan informasi negatif untuk merusak reputasi mereka) dan penggunaan AI secara massif untuk menciptakan dan menyebarluaskan konten-konten palsu dalam skala yang luas. Lebih jauh lagi, Cianci (2023) menyebut penggunaan politik digital secara massif tanpa mempertimbangkan aspek demokrasi dan partisipasi publik disebut sebagai polusi terhadap diskursus politik. Bagi Cianci (2023) demokrasi deliberatif kontemporer dirancang untuk menjamin keberagaman dalam perdebatan politik, memungkinkan warga menyampaikan preferensi yang berbasis informasi saat terlibat dalam proses

pengambilan keputusan publik melalui pemilihan wakil rakyat. Namun, keadilan dalam proses politik menjadi rentan di era digital, terutama akibat penggunaan teknik micro-targeting dan penyebaran disinformasi, yang dapat merusak integritas diskusi publik dan memengaruhi arah opini masyarakat terhadap isu-isu kebijakan.

Ruang digital dalam hal ini media sosial saat ini bergerak ke arah kolonialisasi dan birokratisasi seperti yang digambarkan Habermas ketika mengasosiasikan jaringan televisi. Media sosial tidak lagi menjadi ruang public yang bebas dan rasional tapi kemudian dikooptasi oleh kekuatan ekonomi dan negara, menjadikan diskusi publik bias dan tidak merdeka lagi. Penyebaran hoax dan informasi yang bias membuat media sosial terkooptasi oleh kekuatan elit, akibatnya media sosial yang diharapkan menjadi ruang public yang demokratis dan deliberative, berubah menjadi arena pertarungan kekuasaan antara elit politik untuk memuluskan agenda politik mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polarisasi dan Pembentukan Agenda Politik oleh Aktor Politik

Temuan penelitian ini mengungkapkan interaksi yang kompleks antara paparan konten media sosial, frekuensi interaksi dengan konten politik. Jenis platform media sosial yang digunakan, dan dipengaruhi kolektif mereka terhadap persepsi public tentang isu-isu politik, polarisasi politik dan aktivitas aktor politik. Meningkatnya paparan terhadap konten media sosial berkorelasi dengan semakin seringnya interaksi dengan wacana politik, yang berpotensi membentuk persepsi individu terhadap isu-isu politik. Namun, jenis platform media sosial yang digunakan secara polarisasi dengan memperkuat kepercayaan yang ada dan menciptakan ruang gema. Selain itu, pada aktor politik mengeksploitasi platform media sosial untuk menyebarkan pesan, memobilisasi pendukung dan memengaruhi opini public, yang selanjutnya membentuk wacana seputar perdebatan kebijakan utama. Partisipasi politik yang lebih besar bervariasi berdasarkan jenis pengguna media; misalnya, individu yang menggunakan Facebook dan Twitter melaporkan keterlibatan yang lebih besar dalam demonstrasi dan protes yang eksterem (Hasnen, 2012; Sani, 2014). Memahami dinamika ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial dalam membentuk wacana politik dan mendorong keterlibatan warga negara yang terinformasi.

Dengan berkembangnya internet dan media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok), muncul bentuk "ruang publik baru", yang disebut banyak sarjana sebagai ruang publik digital atau cyber public sphere. Media sosial memiliki beberapa aspek berkaitan dengan aksesibilitas luas: dimana setiap orang dengan koneksi internet bisa berbicara, berbagi ide, dan berpartisipasi; tidak ada satu aktor tunggal (seperti negara atau korporasi tradisional) yang mengontrol seluruh percakapan; terdapat diskusi terjadi hampir secara real-time, melintasi batasan geografis dan sosial; serta warga biasa dapat membentuk wacana, tidak hanya elite politik atau media massa konvensional. Sehingga media sosial menciptakan peluang besar untuk memperluas partisipasi demokratis dan membangun solidaritas sosial baru.

Kekuatan media sosial dalam membentuk agenda politik sangat besar dan beragam, memengaruhi persepsi public, partisipasi politik dan wacana. Platform media sosial berfungsi sebagai saluran penting untuk menyebarluaskan informasi politik, yang memungkinkan para politisi untuk mengukur dan merespon opini public secara dinamis. Persepsi public yang secara signifikan dibentuk oleh media sosial, memainkan peran penting dalam keterlibatan politik, dengan gerakan seperti Black Lives Matter yang mengilustrasikan bagaimana pengakuan terhadap sentiment public dapat memobilisasi partisipasi dalam skala besar (Toklo, 2022). Selain itu, peran penyusunan agenda dari media sosial menentukan penonjolan isu-isu politik, memengaruhi proses pemilihan umum dan diskusi kebijakan secara global (Duche-Peres et al, 20223).

Media sosial atau ruang public digital ini juga membawa tantangan dimana potensi polarisasi yang seringkali terjadi dalam percakapan online sering terpecah dalam "echo chambers" (ruang gema) yang memperkuat pandangan searah, adanya penyebaran berita palsu (hoaks) jauh lebih cepat daripada klarifikasinya, serta algoritma media sosial sering kali mengutamakan konten sensasional demi keuntungan iklan, bukan konten diskusi berkualitas. Dalam pandangan Habermas, media sosial berpotensi menjadi bentuk baru dari ruang publik ideal karena memungkinkan diskusi bebas dan melibatkan banyak pihak. Namun, ruang ini juga rentan dikolonisasi oleh logika komersial dan kekuasaan, sehingga kualitas diskursus rasional sering terganggu.

Kolonisasi dan Distorsi Ruang Publik Digital

Persepsi negative terhadap pengaruh media dapat merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang canggih dari para pembuat kebijakan (Maurer, 2022). Pada akhirnya, interaksi media sosial dengan persepsi public menggarisbawahi perannya yang sangat diperlukan dalam politik modern, yang menyoroti perlunya pemahaman yang bernuansa untuk meningkatkan keterlibatan demokratis dan wacana yang terinformasi.

Polarisasi media merupakan fenomena kompleks dengan implikasi yang signifikan terhadap agenda politik dan wacana public. Fragmentasi media berita dan berkembangnya sumber-sumber media alternatif berkontribusi pada semakin dalamnya kesenjangan antara ideologi politik. Selain itu, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter semakin memicu polarisasi dengan menciptakan ruang gema dan gelembung filter dimana pengguna terpapar konten yang sesuai dengan pendapat mereka (Ahmad, 2023). Akibatnya polarisasi politik makin tercermin dalam liputan media arus utama.

Berita utama yang sensasional dan pemberitaan yang bias berfungsi untuk mengukuhkan sikap partisan dan memperdalam perpecahan Masyarakat. Fenomena ini yang dikenal sebagai "media yang mencerminkan polarisasi", berpotensi mengubah polarisasi elit menjadi polarisasi massa, membentuk opini public dan memengaruhi perilaku pemilih (Sobieraj et al, 2020). Namun ditengah tantangan ini, ada peluang bagi media sosial untuk mempromosikan demokrasi delibatif dan meningkatkan keterlibatan public. Aktor politik termasuk pejabat pemerintah dan pemimpin oposisi, memanfaatkan platform media

sosial untuk menyebarkan informasi, membentuk narasi dan terlibat langsung dengan konstituen (Firdaus et al, 2023). Dengan memahami mekanisme yang mendorong polarisasi media dan peran media sosial dalam membentuk agenda politik, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak buruk polarisasi dan mendorong wacana politik yang informatif dan inklusif.

Aktor politik yang terdiri dari pejabat terpilih, pembuat kebijakan, dan Menteri memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi publik di platform media sosial. Melalui pembuatan dan pembagian konten, para aktor politik secara strategis Menyusun pesan untuk melibatkan dan memengaruhi audiens mereka, memanfaatkan jangkauan media sosial yang luas untuk memperluas penyebaran konten mereka (Hara & Kevin, 2024). Dengan memantau strategi mereka berdasarkan umpan balik dan analisis audiens, para aktor politik meningkatkan efektivitas kampanye media sosial mereka dalam membentuk opini publik (Mc Nair, 2017). Namun, Tindakan para aktor politik di media sosial bukanya tanpa resiko, karena mereka dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah dan polarisasi masyarakat (Stonecahs, 2014).

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, aktor politik dapat melawan persepsi negative dan membentuk opini publik yang menguntungkan melalui komunikasi yang transparan dan keterlibatan strategis (Muhammad et al, 2023). Contohnya dari Malaysia dan Indonesia menggambarkan bagaimana aktor politik memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan transparansi, komitmen dan memperkuat pesan mereka, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan dukungan publik (Ahmad, 2023). Dengan bertanggungjawab, para aktor politik dapat secara efektif terlibat dengan konstituen, membentuk persepsi publik dan memajukan agenda kebijakan mereka di dunia yang semakin digital dan saling terhubung.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan agenda politik dan opini publik. Paparan intensif terhadap konten serta keterlibatan aktif pengguna di platform seperti Facebook dan Twitter secara nyata membentuk persepsi politik individu dan memperkuat polarisasi melalui terbentuknya ruang gema (echo chambers). Meskipun demikian, dampaknya tidak seragam, karena perbedaan antar platform dan karakteristik demografis pengguna turut memengaruhi tingkat keterlibatan politik dan arah polarisasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian ruang publik digital dan politik kontemporer, dengan menekankan bagaimana desain algoritmik media sosial bukan sekadar infrastruktur teknologi, tetapi turut menentukan arah diskursus publik dan distribusi informasi politik. Dalam konteks ini, media sosial tidak netral, melainkan menjadi arena kontestasi yang dikendalikan secara implisit oleh logika platform.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan pentingnya mendorong transparansi dalam sistem algoritma, memperkuat literasi media digital di tengah masyarakat, serta merancang reformasi regulasi yang responsif terhadap dinamika ruang publik digital. Upaya kolaboratif lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif media sosial, sekaligus

mengoptimalkan potensinya dalam mendorong keterlibatan politik yang lebih sehat, partisipatif, dan deliberatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Campante, F., Hojman, D., Alesina, A., Bates, R., Baum, M., Brown, S., Chor, D., Della Vigna, S., Ferraz, C., Frieden, J., Friedman, J., Gentzkow, M., Glaeser, E., Goodman, J., Hanna, R., Ferrara, E., Luttmer, E., Naidu, S., Persson, T., & Powell, R. (2013). Media and Polarization Evidence from the Introduction of Broadcast TV in the United States. Retrieved from https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/rcampante_media_polarization.pdf
- Casero-Ripollés, A., Alonso-Muñoz, L., & Marcos-García, S. (2021). The Influence of Political Aktors in the Digital Public Debate on Twitter About the Negotiations for the Formation of the Government in Spain. *American Behavioral Scientist*, 66(3), 307–322. <https://doi.org/10.1177/00027642211003159>
- Cianci, L., & Zecca, D. (2023). Polluting the Political Discourse. *European Journal of Comparative Law and Governance*, 10(1), 1–46. <https://doi.org/10.1163/22134514-bja10049>
- Dowler, E., Green, J., Bauer, M., & Gasperoni, G. (2006, January). Assessing public perception: issues and methods. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/30528118_Assessing_public_perception_issues_and_methods
- Duche-Pérez, A. B., Vera-Revilla, C. Y., Plata, A. R. M. R., Gutiérrez-Aguilar, O. A., Hillpa-Zuñiga, M. E., & Juárez, A. M. E. (2023). Agenda Setting in Sosial Networks and the Media during Presidential Elections. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 21(1), 55–70. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v21.5031>
- Gilardi, F., Gessler, T., Kubli, M., & Müller, S. (2021). Sosial Media and Political Agenda Setting. *Political Communication*, 39(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910390>
- Hajdúková, T. (2024). Techniques for Manipulating Public Opinion in the Online Space During an Election Campaign as a Hybrid Threat. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0002>
- Harahap, H. I. (2021). The Driving Faktor for Stability of Voter Turnout in Southeast Asia: The Evidence from Malaysian and Indonesian Elections. *Journal of Sosial and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.252>
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (sosial) media in political polarization: a systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Li, M. (2021, July 22). Digital Activism: Sosial Movement on Sosial Media. *Psychology Today*. Retrieved from <https://www.psychologytoday.com/us/blog/understanding-the-social-world/202107/digital-activism-social-movement-social-media>
- Maraj, L. M., Prasad, P., & Roundtree, S. V. (2018). #BlackLivesMatter: pasts, presents, and futures. *Prose Studies*, 40(1-2), 1–14. <https://doi.org/10.1080/01440357.2019.1668638>
- Maulandari, A., Yustitia, S., & Susilo, M. E. (2019). MASS MEDIA AND IMAGE OF POLITICAL AKTORS. *The Indonesian Journal of Communication Studies*, 10(1), 13–25. <https://doi.org/10.31315/ijcs.v10i1.2941>

- Maurer, P. (2022). Perceptions of media influence and performance among politicians in European democracies. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/17480485221146088>
- Muhammad, F., Ahmad, Omar, F., Ganti, W., & Ghapar, W. (2023). Exploring the Influence of Propaganda, Digital Media, and Political Polarization in PRN15 State Elections. Retrieved from https://www.ipptar.gov.my/phocadownload/ejurnal/2023/artikel-pilihan/Artikel9_2023.pdf
- Muhammad, F., Ahmad, Omar, F., Ganti, W., & Ghapar, W. (2024). Exploring the Influence of Propaganda, Digital Media, and Political Polarization in PRN15 State Elections. Retrieved from https://www.ipptar.gov.my/phocadownload/ejurnal/2023/artikel-pilihan/Artikel9_2023.pdf
- Muhammad, F., Bakti, A. M. F., Johori, M. R., & Saleh, S. P. (2023). Political communication of the Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim on Twitter. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 364–376. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i3.12741>
- Morgan, M. G. (1997). The National Academies Press. Retrieved from <https://nap.nationalacademies.org/read/4982/chapter/18>
- Nouri, M. (2018). The Power of Influence: Traditional Celebrity vs Sosial Media Influencer. Retrieved from https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=engl_176
- Paudel, U. R., Gupta, R., Poudel, S., & Adhikari, K. (2018). Political Party Perception and Voting Behavior of People: A Study of Communication Perspective from Nepal. *Advances in Literary Study*, 06(04), 179–192. <https://doi.org/10.4236/als.2018.64016>
- Pew Research Center. (2015, November 23). Perceptions of the public's voice in government and politics. Retrieved from <https://www.pewresearch.org/politics/2015/11/23/8-perceptions-of-the-publics-voice-in-government-and-politics/>
- Ricketts, S. (2021). Do Political Aktors Engage in Strategic Deception on Sosial Media? Warwick Monash Economics Student Papers 2021/16. Retrieved from https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/wmesp/manage/16_-_simon_ricketts.pdf
- Ritze, George & Goodman, Douglas J. (2003). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6*. Jakarta: Prenada Media.
- Salman, A., & Mohamad Salleh, M. A. (2020). Examining Relationship Between Political Agenda on Sosial media and Political Support Among University Students. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3), 281–295. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2020-3603-17>
- Sevenans, J., Stefaan Walgrave, Jansen, A., Karolin Soontjens, Brack, N., & Bailer, S. (2023). Projection in Politicians' Perceptions of Public Opinion. *Political Psychology*, 44(6), 1259–1279. <https://doi.org/10.1111/pops.12900>
- Suna, S. R. (2024). Digital Democracy in India: How Social Media Shapes Political Narratives? *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.26741>
- Toklo, S. (2022). THE EFFECTS OF CORRUPTION PERCEPTION ON POLITICAL PARTICIPATION: EVIDENCE FROM AFRICA. *Вестник Пермского университета. Политология*, 16(2), 109–122. <https://doi.org/10.17072/2218-1067-2022-2-109-122>